

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Praktik penyelenggaraan humas di lingkungan instansi pemerintah, khususnya Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat sedang dalam krisis dan jauh dari ekspektasi. Krisis di sini diartikan sebagai krisis kinerja yang jauh dari amanat perundangan yang mengatur. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah tidak berjalan—nyatanya terpenuhi hanya sebagian kecil saja, yakni fungsi diseminasi, namun itu pun didominasi oleh pemberitaan menyangkut pembentukan citra pimpinan. Kondisi ini jelas berdampak pada jalannya roda pembangunan. Komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah adalah sebuah keharusan jika berbicara dalam tataran demokrasi.

Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat sebagai unit kerja yang sangat strategis telah kehilangan fungsi sebagai mana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, dominasi yang ia terima dari kelompok berkuasa mengharuskannya berlaku tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur perundangan. Hal tersebut menyiratkan humas adalah wadah untuk menunjukkan dan mempertahankan kekuasaan oleh koalisi dominan. *Kedua*, kurangnya pikiran untuk maju dan mengikuti perubahan zaman oleh karena disibukkan selalu oleh upaya menjaga citra pimpinan melalui pemantauan dan produksi berita. Nilai-nilai kehumasan modern yang lebih baik telah ada dan dirumuskan demi terciptanya

komunikasi yang berimbang antara masyarakat. Ini bukan kebuntuan—hanya kealfaan berpikir ke arah yang lebih modern.

Ketiga, era industri pers semakin menjerat Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat. Ketergantungan antara biro humas dengan media, pun sebaliknya, menciptakan lingkaran kemunduran yang tak berkesudahan. Biro humas selalu takut jika ada pemberitaan negatif tentang koalisi dominan, sehingga ia ‘berteman baik’ dengan media cetak. Media cetak juga butuh pemasukan dan memiliki senjata ampuh untuk menjamin kebutuhannya terpenuhi—pemberitaan negatif. Kepala daerah sangat memikirkan reputasinya agar selalu baik dari pada komunikasi pembangunan yang semestinya berjalan baik dengan masyarakat. Memelihara dan mempertahankan kekuasaan bukanlah hal yang haram, akan tetapi meletakkan kepentingan masyarakat menjadi hal yang tidak terlalu penting merupakan kesalahan besar dalam sudut pandang kenegaraan.

Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat dalam posisi mendominasi masyarakat secara wacana, sekaligus terdominasi oleh koalisi dominan yang berada di atasnya. Kondisi ini telah berlangsung lama dan sulit sekali diubah. Regulasi yang mengatur sudah sangat baik, akan tetapi aparat yang menjalankan dipenuhi belenggu oleh kekuatan-kekuatan yang berpengaruh. Bukannya tidak ada orang di tubuh Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat yang mengerti tentang apa yang seharusnya dilakukan. Tentu ada. Akan tetapi pada akhirnya, penulis merasa miris, sepertinya semua berlaku dan kembali kepada pragmatisme—bahwa kebenaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan masing-masing.

1.2 Saran

Penyelenggaraan model komunikasi searah dalam aktivitas kehumasan Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat jauh dari ideal. Beberapa langkah konkrit perlu dilakukan segera untuk dapat menciptakan model humas modern yang sarat dengan komunikasi dua arah berimbang. *Pertama*, koalisi dominan yang notabene merupakan gubernur Sumatera Barat dan wakilnya harus secara nyata mengimplementasikan amanah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dari hulu, harus kembali kepada produk hukum yang mengatur. Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat akan selalu menuruti perintah dari atas mengikuti hirarki kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan. *Kedua*, memperbaiki *mindset* lama dengan sebuah pemikiran bahwasanya pemerintah ada untuk menjadi abdi masyarakat. Etika publik aparatur harus dijunjung tinggi. Kesadaran ini merupakan sikap mental yang mutlak untuk mewujudkan perubahan dalam penyelenggaraan kehumasan di lingkungan pemerintah. *Ketiga*, dengan adanya pemikiran yang maju dan modern di tubuh pemerintah, akan membuat pemerintah menjadi tahu mana langkah yang efektif dan efisien serta mana yang tidak. Pemerintah akan dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan penggunaan media yang dapat memfasilitasi komunikasi yang bersifat dua arah bersama masyarakatnya. Ini juga secara perlahan melonggarkan ikatan kuat yang selama ini terjadi antara Biro Humas Sekda Provinsi Sumatera Barat bersama media cetak.